



## Model Manajemen Kepemimpinan di Sekolah Inklusif Berbasis Kearifan Lokal (Studi Kasus di SDN 31 Mataram)

Mardiana<sup>1</sup>, Istilam<sup>1\*</sup>, Samsul Hadi Hidayatullah<sup>1</sup>, Azkar Nawawi<sup>1</sup>, Bq. Izwana<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Magister Administrasi Pendidikan, Pascasarjana Universitas Mataram, Mataram, Indonesia.

DOI: <https://doi.org/10.29303/goescienceed.v7i2.1162>

### Article Info:

Received : 23 April 2026  
Revised : 28 April 2026  
Accepted : 11 Mei 2026  
Published : 14 Mei 2026

### Correspondence:

Istilam

Phone:

**Abstract:** This study aims to examine how leadership management based on local wisdom is implemented in inclusive schools. The research employed a qualitative approach with a case study design. The subjects of this study included inclusive classroom teachers, special assistant teachers, principals, parents, and students with special needs. The findings revealed that leadership adopting local wisdom values such as “mutual learning, compassion, and care” was successful in creating an inclusive, harmonious, and enjoyable school culture. According to Hasim Asyari, being a leader in an inclusive school presents many challenges, especially in communities that have not fully accepted diversity. However, schools that involve traditional community leaders in educational decision-making processes are able to harmoniously bridge the interests of schools and society. In addition, the principal regularly updates school programs by identifying available resources, implementing local wisdom-based outing class activities, and providing inclusive education training for teachers so that the implementation of inclusive learning can run more effectively and optimally.

**Keywords:** Model; Leadership; Inclusive School; Local Wisdom.

**Citation:** Mardiana, Istilam, Hidayatullah, S. H., Nawawi, A., & Izwana, B. (2026). Model Manajemen Kepemimpinan di Sekolah Inklusif Berbasis Kearifan Lokal (Studi Kasus di SDN 31 Mataram). *Jurnal Pendidikan, Sains, Geologi, Dan Geofisika (GeoScienceEd Journal)*, 7(2), 1401-1406. <https://doi.org/10.29303/goescienceed.v7i2.1162>

## Pendahuluan

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Dalam konteks ini, pendidikan inklusi hadir sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menyediakan layanan pendidikan yang setara dan tanpa diskriminasi, termasuk bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Di Indonesia, paradigma pendidikan terus mengalami pergeseran dari sistem segregasi menuju sistem yang lebih terbuka dan inklusif.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusi, di antaranya melalui Permendiknas Nomor. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki

Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan Pendidikan yang memberikan kesempatan atau akses yang seluas-luasnya kepada semua anak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan individu peserta didik tanpa diskriminasi.

Pendidikan inklusif merupakan pendekatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua anak, tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik, atau kondisi lainnya, memperoleh kesempatan pendidikan yang setara. Tujuan lainnya adalah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua anak (termasuk anak berkebutuhan khusus) untuk memperoleh pendidikan yang layak sesuai dengan kondisi anak dan menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keanekaragaman, tidak diskriminatif, serta pembelajaran yang ramah terhadap

semua anak. Anak Berkebutuhan Khusus yang dapat dilayani melalui pendidikan inklusif di antaranya, cacat fisik, intelektual, sosial, emosional, cerdas dan atau berbakat istimewa, anak yang tinggal di daerah terpencil/terbelakang, suku terasing, korban bencana alam/sosial, kemiskinan, warna kulit, gender, ras, bahasa, budaya, agama, tempat tinggal, kelompok politik, anak kembar, yatim, yatim piatu, anak pedesaan, anak kota, anak terlantar, tuna wisma, anak terbuang, anak yang terlibat dalam sistem pengadilan remaja, anak terkena daerah konflik HIV/AIDS (ODHA), anak gelandangan dan lain-lain sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya.

Namun, pelaksanaan pendidikan inklusi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya guru yang kompeten, kurangnya fasilitas yang mendukung aksesibilitas, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keberagaman dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya strategis dari berbagai pihak untuk meningkatkan efektivitas implementasi pendidikan inklusi agar benar-benar mampu memenuhi kebutuhan semua peserta didik. Pendidikan inklusi tidak hanya berkontribusi terhadap pemenuhan hak anak, tetapi juga membentuk lingkungan belajar yang toleran, demokratis, dan menghargai perbedaan. Dengan demikian, pendidikan inklusi diharapkan dapat menjadi bagian penting dalam membangun generasi bangsa yang adil dan beradab. Berbagai studi menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan inklusi sangat bergantung pada kompetensi dan sikap guru dalam mengelola pembelajaran yang inklusif.

Guru dituntut tidak hanya memahami karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus, tetapi juga mampu menerapkan strategi pembelajaran yang adaptif serta membangun iklim kelas yang ramah dan suportif. Selain itu, masih terdapat gap antara kebijakan dan praktik di lapangan. Banyak sekolah inklusi yang masih menerapkan pendekatan segregatif dalam praktiknya, seperti memisahkan anak berkebutuhan khusus dari kegiatan kelas reguler. Hal ini bertentangan dengan semangat inklusi yang seharusnya menjamin partisipasi aktif semua siswa dalam satu sistem pendidikan yang sama. Dalam konteks Indonesia yang kaya akan budaya dan kearifan lokal, penting untuk mengembangkan model manajemen kepemimpinan sekolah inklusif yang sesuai dengan nilai-nilai lokal dan kontekstual.

Kearifan lokal, sebagai basis dalam mengelola dan mengembangkan pendidikan inklusif yang lebih humanis dan adaptif. Kepemimpinan dalam pendidikan inklusif menuntut kepala sekolah dan tenaga kependidikan untuk memiliki sikap terbuka, empatik, dan kolaboratif. Model kepemimpinan ini harus mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan peserta didik yang

beragam, serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, integrasi kearifan lokal dalam model kepemimpinan sekolah inklusif menjadi sangat relevan dalam menjawab tantangan keberagaman serta memperkuat identitas dan nilai-nilai kebangsaan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji efektivitas pelaksanaan pendidikan inklusi di sekolah dasar, khususnya dalam kaitannya dengan model manajemen kepemimpinan di sekolah inklusif berbasis kearifan lokal.

## Metode

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Adapun subjek penelitiannya adalah guru kelas inklusi, guru pendamping khusus, Kepala sekolah, orang tua, dan siswa berkebutuhan khusus itu sendiri. Dalam penentuan subjek dilakukan secara purposive sampling yaitu dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung dengan mereka dalam praktik pendidikan inklusi berbasis kearifan lokal. Adapun data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi.

## Hasil dan Diskusi Sekolah Inklusif

Sekolah inklusif merupakan lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan belajar kepada semua peserta didik, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus (ABK), dalam satu lingkungan pendidikan yang sama (UNESCO, 2009). Prinsip dasar pendidikan inklusif adalah non-diskriminasi, aksesibilitas, dan partisipasi penuh. Menurut Sunardi et al. (2011), sekolah inklusif memerlukan adaptasi kurikulum, metode pembelajaran, dan lingkungan yang mendukung keberagaman.

## Kepemimpinan dalam Konteks Pendidikan Inklusif

Kepemimpinan di sekolah inklusif menuntut kepala sekolah memiliki kemampuan kolaboratif, empatik, dan adaptif. Menurut Salisbury dan McGregor (2002), kepemimpinan inklusif harus mampu menciptakan budaya sekolah yang menerima keberagaman dan mendorong partisipasi semua pihak. Dalam konteks ini, kepala sekolah menjadi agen perubahan yang menjembatani kebutuhan siswa, guru, dan komunitas. Leithwood et al. (2004) mengembangkan model kepemimpinan transformasional yang relevan dengan sekolah inklusif, mencakup:

1. Mengembangkan visi Bersama
2. Mendorong kolaborasi dan inovasi
3. Mendukung perkembangan profesional guru

4. Menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan peserta didik yang beragam

### Manajemen Kepemimpinan Sekolah

Model manajemen kepemimpinan mengacu pada pendekatan sistematis dalam merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengevaluasi proses pendidikan. Menurut Bush (2003), manajemen kepemimpinan mencakup empat aspek utama:

1. Visi dan strategi
2. Manajemen sumber daya
3. Pengembangan staf
4. Pengawasan dan evaluasi kinerja

Dalam konteks inklusi, manajemen kepemimpinan harus memastikan tersedianya sumber daya yang cukup, pelatihan guru, serta penyesuaian administratif dan pembelajaran.

### Kearifan Lokal sebagai Basis Kepemimpinan

Kearifan lokal adalah nilai-nilai, norma, dan praktik yang berkembang dalam suatu komunitas sebagai hasil adaptasi terhadap lingkungan. Koentjaraningrat (1997) menyatakan bahwa kearifan lokal merupakan bagian dari sistem budaya yang memengaruhi cara masyarakat berpikir dan bertindak. Dalam kepemimpinan sekolah, nilai-nilai lokal seperti gotong royong, musyawarah, toleransi, dan kepedulian sosial dapat dijadikan dasar dalam membangun budaya inklusif. Menurut Tilaar (2004), pendidikan yang berbasis kearifan lokal dapat memperkuat identitas dan meningkatkan relevansi pendidikan dengan konteks masyarakat. Studi oleh Wibowo dan Wahyudi (2021) menunjukkan bahwa penerapan kearifan lokal dalam manajemen sekolah meningkatkan partisipasi masyarakat dan menciptakan lingkungan belajar yang harmonis bagi semua siswa.

### Model Manajemen Kepemimpinan di Sekolah Inklusif Berbasis Kearifan Lokal

Model ini menekankan integrasi antara praktik kepemimpinan inklusif dengan nilai-nilai lokal masyarakat. Elemen kuncinya meliputi:

1. Kepemimpinan partisipatif: melibatkan semua stakeholder (guru, orang tua, masyarakat) dalam pengambilan keputusan
2. Penerapan nilai-nilai lokal: seperti keadilan sosial, gotong royong, dan kepedulian terhadap sesama dalam praktik sehari-hari di sekolah
3. Pengembangan budaya sekolah inklusif: melalui pendekatan budaya yang sesuai dengan konteks lokal

4. Pelatihan guru berbasis lokalitas: memperkuat pemahaman guru akan nilai-nilai lokal dan kebutuhan siswa ABK

### Landasan filosofis dan Landasan Yuridis Pendidikan Inklusif

#### landasan filosofis

1. Setiap anak mempunyai hak mendasar untuk memperoleh Pendidikan
2. Setiap anak mempunyai potensi, karakteristik, minat, kemampuan dan kebutuhan belajar yang berbeda
3. Sistem pendidikan seyogyanya dirancang dan dilaksanakan dengan memperhatikan keanekaragaman karakteristik dan kebutuhan anak
4. Anak berkebutuhan khusus mempunyai hak untuk memperoleh akses pendidikan di sekolah umum
5. Sekolah umum dengan orientasi inklusi merupakan media untuk menghilangkan sikap diskriminasi, menciptakan masyarakat yang ramah, membangun masyarakat yang inklusif dan mencapai pendidikan bagi semua

#### Landasan Yuridis

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
4. Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pada Satuan Pendidikan.

### Model Manajemen di SD Negeri 31 Mataram sebagai Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif.

Model Manajemen Kepemimpinan di Sekolah Inklusif. Menurut Hasim Asyari, M.Pd selaku Kepala sekolah di SD Negeri 31 Mataram, sesuai dengan jargon sekolahnya yaitu "Harmoni dalam Kebhinekaan" model manajemen kepemimpinan di SD Negeri 31 Mataram mencakup dimensi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi yang bersifat partisipatif dan adaptif. Kepala sekolah bertindak sebagai fasilitator yang menciptakan iklim sekolah yang menerima dan mendukung semua peserta didik. Strategi kepemimpinan yang diterapkan meliputi kepemimpinan transformasional, demokratis, dan

berbasis nilai-nilai inklusi. Dalam praktiknya, kepala sekolah perlu:

1. Menyusun visi dan misi sekolah yang mengakomodasi semangat inklusif.
2. Menyediakan sarana prasarana yang ramah terhadap semua anak.
3. Mendorong guru untuk mengembangkan pembelajaran diferensiatif.
4. Membangun komunikasi yang efektif dengan orang tua dan komunitas

### **Model Manajemen Pembelajaran di Sekolah Inklusif.**

Sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif tentunya kepala sekolah dan guru harus memahami bagaimana manajemen pembelajara di sekolah inklusif yang meliputi,

### **Implikasi menerima keragaman peserta didik terhadap pembelajaran.**

1. Guru harus memahami berbagai perbedaan.
2. Setiap individu memiliki karakteristik sendiri, baik dalam gaya belajar atau kemampuan mengaktulisasikan berbagai kemampuan dan keterampilannya
3. Guru harus mempertimbangkan metode pembelajaran yang mampu mengakomodir perbedaan kondisi atau kemampuan belajar setiap peserta didik.
4. Guru harus mampu menciptakan suasana kelas yang ramah dan nyaman bagi semua peserta didik.

### **Klasifikasi peserta didik**

1. Peserta didik regular yaitu Peserta didik yang tidak memiliki hambatan tertentu, misalnya hambatan fisik, mental kognitif, sensorik dan hambatan lainnya yang menyebabkan mereka mengalami kendala dalam mengikuti pembelajaran secara klasikal.
2. Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yaitu Peserta didik yang memiliki hambatan tertentu, seperti hambatan penglihatan, hambatan pendengaran, hambatan intelektual, hambatan fisik, hambatan dengan autistik, dan hambatan lainnya seperti anak hiperaktif, lamban belajar, rendah konsentrasi dan gangguan perilaku tertentu
3. Peserta Didik Berkebutuhan Layanan Khusus yaitu Peserta didik yang mengalami hambatan secara eksternal, seperti anak korban bencana alam, anak korban HIV, anak korban kekerasan rumah tangga dan lingkungan.

### **Sistem Pelaksanaan Pendidikan Inklusif**

Definisi Penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan secara bersama-sama baik peserta didik umumnya dengan peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK) sepanjang waktu.

- |   |            |
|---|------------|
| 1. Kurikulum                                | Kurikulum  |
| Fleksibel/Pembelajaran                      | Akomodatif |
| (Modifikasi dan Penyesuaian).               |            |
| 2. Bentuk Sekolah Reguler (Integrasi Penuh) |            |
| 3. Prinsip                                  |            |

Dalam sekolah/kelas umum terdapat peserta didik yang beragam, ada peserta didik reguler dan ada peserta didik berkebutuhan khusus yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam pembelajaran , yaitu

1. Siswa hadir bersama-sama,
2. Saling menghargai dan menerima perbedaan,
3. Semua bisa berpartisipasi dalam kegiatan belajar sesuai dengan kemampuannya masing-masing
4. Semua anak dalam kelas diyakini bisa mencapai prestasi sesuai kondisinya masing masing.
5. Guru kelas/mata pelajaran bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan kegiatan belajar
6. Guru Pembimbing Khusus/GPK membantu guru kelas/mapel merancang kegiatan belajar sehingga semua anak bisa belajar dalam kelas yang sama.

### **Tahapan dalam pelaksanaan Pendidikan Inklusi.**

#### **Identifikasi Anak Berkebutuhan Khusus**

1. Identifikasi merupakan proses menemukan peserta didik sebelum yang bersangkutan mengikuti pembelajaran
2. Identifikasi ABK= menemukan kelainan/penyimpangan
3. Dilaksanakan melalui pengamatan gejala.

AsessmenAnak Berkebutuhan Khusus Asesmen adalah upaya untuk mengetahui kemampuan-kemampuan yang dimiliki, hambatan/kesulitan yang dialami, mengetahui latar belakang mengapa hambatan/kesulitan itu muncul dan untuk mengetahui bantuan apa yang dibutuhkan oleh yang bersangkutan atau pengertian secara khususnya pengumpulan data yang menyeluruh sebagai dasar penyusunan program.

### **Konsep dan Model Adaptasi Kurikulum**

Adaptasi Kurikulum 2013 = KI & KD oleh Pemerintah tidak boleh dirubah yang boleh diadaptasi selain KI & KD.

1. Adaptasi Kurikulum Merdeka = selain Capaian Pembelajaran dan Tujuan Pembelajaran .
2. Model Adaptasi Kurikulum (Sesuai UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 Ayat 2) yaitu Duplikasi, Modifikasi, Adaptasi dan Omisi.
3. Aspek yang diadaptasi yaitu tujuan pembelajaran, isi , proses dan Evaluasi.

### **Pembelajaran Akomodatif.**

Pembelajaran Akomodatif adalah upaya yang dilakukan guru dalam pembelajaran agar informasi yang sesuai dengan kemampuannya. Hal-hal yang perlu di akomodasi yaitu:

1. Materi pembelajaran
2. Lingkungan belajar
3. Proses pembelajaran yaitu metode dan evaluasinya.
4. Media pembelajaran.

### **Peran Kearifan Lokal dalam Kepemimpinan Sekolah Inklusif**

Kearifan lokal berperan penting dalam membentuk nilai dan norma yang menjadi pedoman dalam kepemimpinan. Misalnya, dalam budaya Sasak dikenal dengan prinsip "bedengah" (mengasuh dengan kasih sayang) dan "gotong royong" yang mencerminkan kerja sama dan solidaritas. Nilai-nilai ini sangat relevan dengan semangat inklusi, yaitu merangkul perbedaan dan membangun kebersamaan. Di sekolah inklusif yang berbasis kearifan lokal, praktik budaya seperti upacara adat, permainan tradisional, dan kegiatan seni digunakan untuk mengembangkan rasa saling menghargai dan memperkuat kohesi sosial. Apalagi dengan adanya program pemerintah seperti Sabtu Budaya dan sebagainya sangat membantu pihak sekolah dalam upaya pelestarian dan pengenalan budaya kepada peserta didik.

Kepemimpinan yang sensitif terhadap budaya lokal cenderung lebih mudah diterima oleh masyarakat, sehingga memudahkan kolaborasi dalam implementasi pendidikan inklusif. Sesuai dengan program pembiasaan yang dilakukan di SD Negeri 31 Mataram, di setiap Sabtu Budaya yaitu di hari Sabtu minggu ketiga setiap bulannya, sekolah berupaya menggelar kegiatan yang sesuai dengan budaya sasak seperti mengenalkan permainan tradisional seperti peresean, selodor, sebok tungkeng dan masih banyak lagi, selain itu siswa diajak melakukan fasion show dengan menggunakan baju adat daerah , pengenalan tarian daerah sasak (untuk tarian baru ada dua tarian yang sudah dikenal siswa dan sudah ditampilkan yaitu beriuik tinjal dan rudat ) dan kegiatan sabtu budaya diakhiri dengan "begibung" atau

makan bersama untuk mempererat keharmonisan antar warga sekolah.

### **Integrasi Kearifan Lokal dalam Model Kepemimpinan**

Integrasi ini dilakukan dalam berbagai aspek:

1. Perencanaan Sekolah: Melibatkan masyarakat lokal dalam penyusunan visi dan misi sekolah.
2. Pengorganisasian: Mendistribusikan peran kepemimpinan kepada guru dan masyarakat sesuai potensi lokal.
3. Pelaksanaan Program: Menyelenggarakan kegiatan berbasis budaya seperti seni lokal yang inklusif.
4. Evaluasi: Menilai keberhasilan program berdasarkan indikator budaya dan sosial selain akademik.

Peran orang tua dalam ikut ambil bagian dalam kegiatan pembelajaran di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi sangat berpengaruh besar terhadap keberhasilan semua program yang sudah disusun. Karena pada kenyataannya siswa lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga sehingga pengenalan budaya, pembiasaan dan proses pembelajaran yang sudah diberikan orang ua akan lebih membekas pada peserta didik khususnya pada peserta didik berkebutuhan khusus.

Studi kasus di SD Negeri 31 Mataram, salah satu sekolah penyelenggara pendidikan Inklusif di Kota Mataram menunjukkan bahwa kepemimpinan yang mengadopsi nilai-nilai lokal seperti "saling asah, asih, dan asuh" berhasil membangun budaya sekolah yang inklusif dan menyenangkan.. Menurut Hasim Asyari,M.Pd, sebagai pemimpin di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi tentu memiliki banyak tantangan , apalagi dengan kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya menerima keberagaman, sekolah yang melibatkan tokoh adat dalam proses pengambilan keputusan pendidikan mampu menjembatani kepentingan sekolah dengan masyarakat secara harmonis.

Kepala sekolah secara berkala melakukan pembaruan program sekolah dengan melakukan identifikasi sumber daya yang ada, outing class berbasis kearifan lokal dan memberikan pelatihan mengenai pendidikan inklusi kepada guru sehingga dalam pelaksanaannya guru tidak mengalami kesulitan. Hubungan komunikasi yang baik antara pihak sekolah, wali murid dan warga di lingkungan sekitar sangat menentukan keberhasilan penyelenggraan pendidikan inklusi di SD Negeri 31 Mataram. Ini dibuktikan dengan berhasilnya SD Negeri 31 Mataram meraih penghargaan sekolah penyelenggara pendidikan inklusi terbaik kategori SD dalam AISO ( Anugerah Istimewa Sekolah )

provinsi NTB tahun 2024. Tentunya dengan penghargaan ini diharapkan sekolah dapat meningkatkan pelayanan dan lebih mengedepankan kearifan lokal dalam pembelajaran.

## Kesimpulan

Model manajemen kepemimpinan di sekolah inklusif berbasis kearifan lokal merupakan strategi yang relevan dalam menghadapi tantangan keberagaman peserta didik. Kepemimpinan yang inklusif dan berbasis nilai-nilai lokal seperti gotong royong, toleransi, dan empati terbukti mampu menciptakan lingkungan sekolah yang ramah bagi semua siswa. Dengan mengintegrasikan kearifan lokal dalam seluruh aspek manajemen sekolah, kepala sekolah tidak hanya menjadi pemimpin administratif, tetapi juga agen perubahan sosial yang mampu membangun budaya sekolah yang inklusif, humanis, dan bermartabat. Pemerintah daerah perlu mengembangkan pelatihan kepemimpinan sekolah inklusif yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal. Sekolah perlu memperkuat kerja sama dengan masyarakat dan tokoh adat untuk memperkaya program inklusi.

## Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

## Referensi

- Bass, B. M. (1985). *Leadership and Performance Beyond Expectations*. Free Press.
- Spillane, J. P. (2006). *Distributed Leadership*. Jossey-Bass.
- UNESCO. (2009). *Policy Guidelines on Inclusion in Education*. Paris: Tilaar, H. A. R. (2004). *Multikulturalisme: Tantangan tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Grasindo.
- Koentjaraningrat. (2002). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Rineka Cipta.
- Sedyawati, E. (2006). *Kebudayaan Indonesia: Masalah dan Tantangan*. Gramedia.
- Kemendikbud. (2017). *Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus.
- Setyowati, N. (2020). *Kepemimpinan berbasis budaya lokal Jawa dalam menciptakan lingkungan sekolah inklusif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharto, E., & Nugroho, D. (2022). *Integrasi kearifan lokal dalam manajemen pendidikan inklusif*. Bandung: Alfabeta.
- Kurniawan, I. (2019). *Model kepemimpinan berbasis nilai Tri Hita Karana dalam pendidikan inklusif di Bali*. Denpasar: Udayana University Press.